

Potensi

USAHA MIKRO KECIL

PROVINSI JAWA TENGAH



<http://www.pengems.go.id>

Potensi

**USAHA
MIKRO
KECIL**

PROVINSI JAWA TENGAH

**POTENSI USAHA MIKRO KECIL
PROVINSI JAWA TENGAH**

No. Publikasi : 33550.1808

No. Katalog : 9102067.33

Ukuran Buku : 20 cm x 20 cm

Jumlah Halaman : vi + 32 halaman

Naskah : Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Penyunting : Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Desain Kover oleh : Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Diterbitkan oleh : © Badan Pusat Statistik

Tata Letak : Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Sumber Ilustrasi: www.freepik.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

<https://jateng.bps.go.id>

Kata Pengantar



Pada tahun 2016, BPS telah melaksanakan kegiatan pendataan lengkap atau listing Sensus Ekonomi Tahun 2016 (SE2016). Untuk memperoleh gambaran yang lebih rinci mengenai aktivitas Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Menengah Besar (UMB), pada tahun 2017 dilakukan SE2016 Lanjutan.

Hasil pendataan SE2016 Lanjutan dapat digunakan sebagai dasar untuk analisis dan perumusan kebijakan di antaranya untuk mengukur kinerja Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan memberikan gambaran karakteristik usaha, diantaranya kualitas sumber daya manusia, kondisi aksesibilitas permodalan, prospek usaha, dan kinerja keuangannya. Informasi tersebut diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pemerintah untuk membantu pengembangan UMK baik melalui pembinaan maupun penyusunan regulasi yang mampu melindungi dan meningkatkan kinerja UMK. Dengan demikian, peran UMK dalam kegiatan ekonomi lokal semakin kuat, lapangan pekerjaan pun makin meningkat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyukseskan SE2016 Lanjutan.

Semarang, Desember 2018
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Jawa Tengah

Sentot Bangun Widoyono



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI	V
PENDAHULUAN	1
UMK MENDOMINASI JUMLAH USAHA DI JAWA TENGAH	3
UMK SEBAGAI PENYERAP TENAGA KERJA TERBANYAK	7
PENGELOLAAN UMK DILAKUKAN SECARA SEDERHANA	11
PELAKU UMK PERLU MENINGKATKAN KAPABILITAS	17
KINERJA USAHA DARI SISI KEUANGAN	21
PROSPEK DAN KENDALA USAHA	25



Pendahuluan

Dunia usaha Jawa Tengah pada saat ini masih didominasi oleh Usaha Mikro Kecil (UMK). Dari hasil SE2016 Lanjutan, jumlah usaha ini mencapai lebih dari 4 juta usaha atau 99,19 persen dari total usaha nonpertanian di Jawa Tengah. Usaha ini juga mampu menyerap tenaga kerja Jawa Tengah lebih dari 8 juta orang atau sekitar 83,24 persen dari total tenaga kerja nonpertanian. Ketika krisis menerpa Indonesia pada sekitar tahun 1997-1998, yang juga melanda Jawa Tengah, UMK terbukti tetap berdiri kokoh di saat usaha-usaha besar lainnya berjatuh.

Keunggulan UMK dalam bertahan dari badai krisis karena berbagai alasan. Pertama, umumnya UMK menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, UMK tidak mengandalkan bahan baku impor dan lebih memanfaatkan sumber daya lokal baik dari sisi sumber daya manusia, modal, bahan baku, maupun peralatannya. Ketiga, umumnya bisnis UMK menggunakan modal relatif rendah. Dengan keunggulan tersebut, UMK tidak begitu merasakan pengaruh krisis global yang biasanya ditandai dengan penurunan nilai tukar rupiah yang dalam.

Meskipun mempunyai beberapa keunggulan, UMK juga mempunyai banyak keterbatasan sehingga usaha ini tidak mampu untuk berkembang. Keterbatasan-keterbatasan tersebut diantaranya minimnya akses perbankan; kemampuan dan pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah; dikelola dengan cara yang sederhana; penggunaan teknologi yang terbatas; dan belum mampu mengimbangi perubahan selera konsumen khususnya yang berorientasi ekspor.

Mengingat pentingnya peran UMK dalam menggerakkan roda perekonomian Jawa Tengah, hendaknya kendala dan keterbatasan tersebut tidak menyurutkan pelaku UMK untuk mengembangkan usaha dan bisnisnya. Peluang untuk mengembangkan bisnis UMK terbuka lebar jika pelaku UMK mampu membaca situasi pasar. UMK mempunyai peran yang penting khususnya pada usaha-usaha yang memanfaatkan sumberdaya alam maupun padat tenaga kerja.

Untuk melihat potensi dan kinerja UMK saat ini, serta untuk melihat prospeknya di masa mendatang, perlu melakukan analisis kinerja UMK. Hal ini juga bersesuaian dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2013, yang menyatakan bahwa pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dilakukan melalui pendataan, identifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi. Dengan adanya identifikasi kinerja UMK dan permasalahan yang dihadapi, maka akan memberikan sumbangsih dalam penyusunan regulasi atau kebijakan yang mampu melindungi dan meningkatkan kinerja UMK.



UMK
MENDOMINASI
JUMLAH
USAHA DI
JAWA TENGAH

Bagian

1

<https://jateng.bps.go.id>

UMK mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian Jawa Tengah. Pengelolaan usaha ini dilakukan secara sederhana sehingga lebih banyak menjadi pilihan karena memerlukan modal yang relatif kecil. Oleh sebab itu aktivitas UMK merupakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup dan memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam aktivitasnya. Jenis barang/ komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat. Oleh sebab itu, mayoritas UMK di Jawa Tengah beroperasi secara komersil kurang dari 10 tahun.

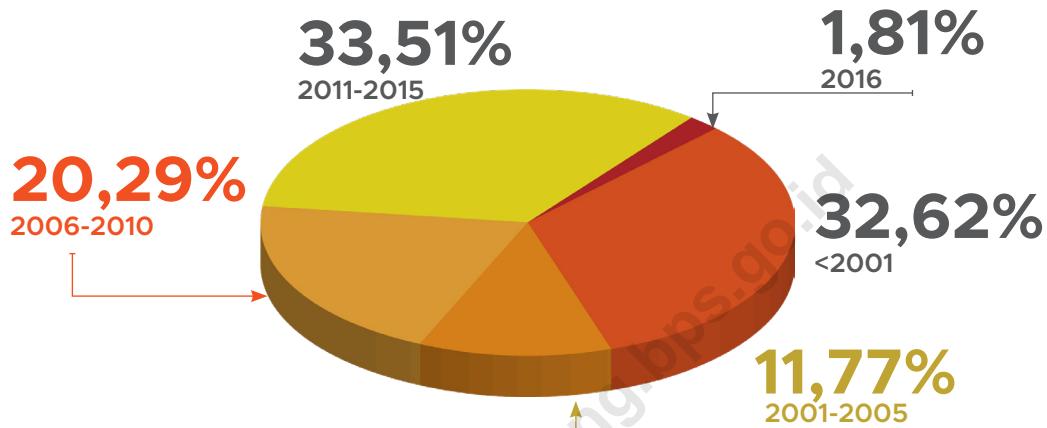
Persentase UMK di Jawa Tengah mencapai 99,19 persen dari total jumlah usaha di Jawa Tengah. Jumlah UMK tersebar pada semua kategori non Pertanian. Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G) mendominasi jumlah UMK dengan jumlah sekitar 1,78 juta usaha atau mencapai 43,30 persen. Usaha Industri Pengolahan (Kategori C) dan usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (Kategori I) juga mempunyai kontribusi yang besar, masing-masing sejumlah lebih dari 1 juta usaha atau

lebih dari 24 persen dan lebih dari 600 ribu usaha atau lebih dari 14 persen.

Karesidenan Pekalongan dengan jumlah penduduk hampir seperlima penduduk Jawa Tengah masih menjadi konsentrasi UMK. Jumlah UMK di karesidenan ini sekitar 800 ribu usaha atau mencapai lebih dari 19 persen. Namun jika dirinci menurut kabupaten, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen merupakan tiga kabupaten dengan jumlah UMK tertinggi di Jawa Tengah yang masing-masing berjumlah 213 ribu usaha, 190 ribu usaha dan 180 ribu usaha.

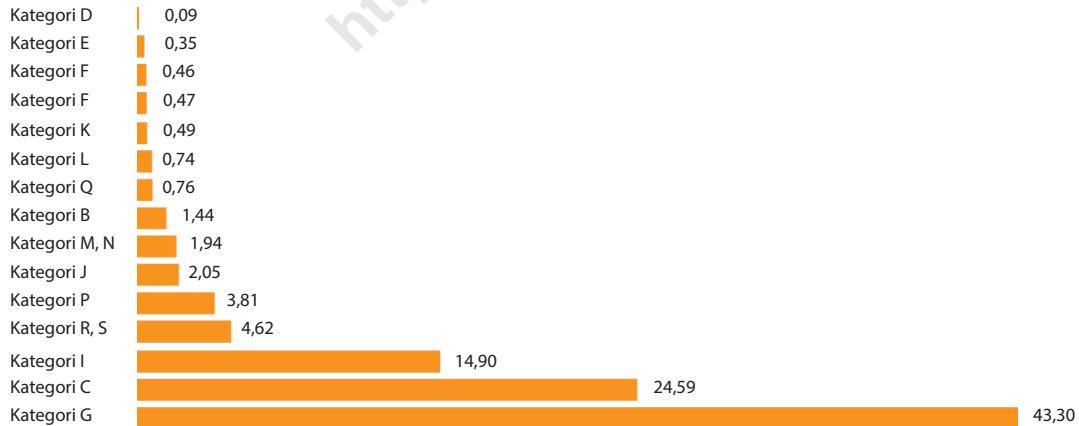
**UMK
MENDOMINASI
JUMLAH
USAHA DI
JAWA TENGAH**

Gambar 1.
Persentase Jumlah UMK Menurut Tahun Beroperasi, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 2.
Persentase Jumlah UMK Menurut Kategori, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Tabel 1.
Jumlah dan Persentase UMK Menurut Karesidenan , 2017

Karesidenan	Persentase (%)
Banyumas	15,98
Kedu	16,63
Surakarta	19,27
Pati	12,85
Semarang	15,77
Pekalongan	19,50
Total	100,00

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan



**UMK
SEBAGAI
PENYERAP
TENAGA KERJA
TERBANYAK**

Bagian

2

https://jateng.bps.go.id

Jumlah UMK yang sangat besar di Jawa Tengah tentunya sangat berperan untuk menyerap tenaga kerja sekaligus mengurangi pengangguran. Berdasarkan data Sakernas 2017, pengangguran di Jawa Tengah mencapai 4,57 persen, terbanyak pada lulusan SMK yang mencapai lebih dari 11 persen dari semua lulusan SMK. Tingginya kontribusi lulusan SMK terhadap jumlah pengangguran di Jawa Tengah, salah satu disebabkan rendahnya keahlian soft skill lulusan SMK khususnya di SMK yang kualitas pendidikannya belum teruji. Selain SMK, pengangguran juga banyak terjadi pada lulusan SMA yang mencapai lebih dari 7 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa pengangguran cukup banyak terjadi pada angkatan kerja dengan tingkat pendidikan menengah.

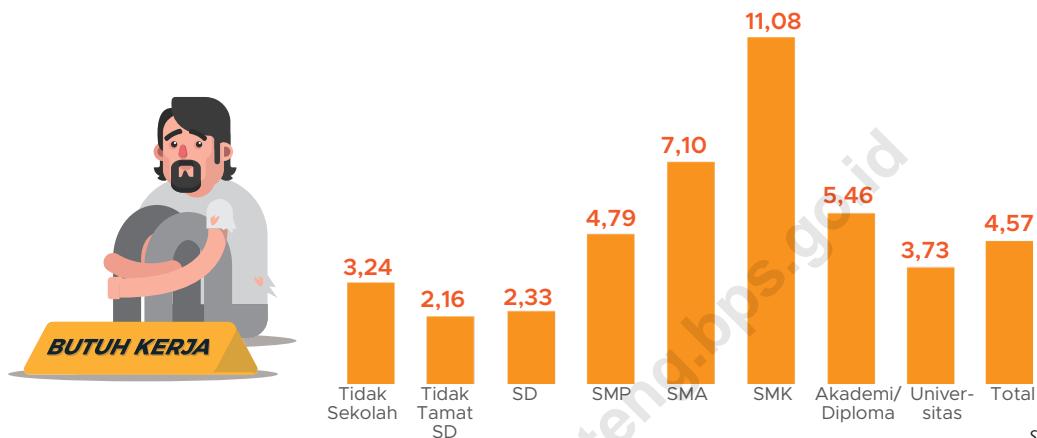
Pembekalan keterampilan bagi angkatan kerja dengan tingkat pendidikan menengah ini akan menjadi aksi yang sangat strategis agar mereka mampu menciptakan usaha sendiri. UMK merupakan salah satu wadah yang paling tepat untuk menampung para tenaga kerja yang tidak memiliki skill tinggi. Data SE2016 Lanjutan memberikan informasi bahwa UMK telah menyerap lebih dari delapan puluh persen tenaga kerja nonpertanian di Indonesia, atau mencapai lebih dari 8 juta

orang.

Penyerapan tenaga kerja UMK terjadi paling banyak pada usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (kategori G) mencapai lebih dari sepertiga dari tenaga kerja pada UMK secara keseluruhan. Usaha Industri Pengolahan (kategori C) dan Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (kategori I) menempati urutan kedua dan ketiga dalam penyerapan tenaga kerja pada UMK. Secara-rata-rata per usaha, aktivitas Konstruksi (kategori F) dan Pendidikan (kategori P) memiliki penyerapan tenaga kerja tertinggi yaitu masing-masing sekitar 13 pekerja per usaha dan 9 pekerja per usaha. Namun secara umum, rata-rata penyerapan tenaga kerja UMK di Jawa Tengah hanya sebesar 2 pekerja per usaha.

**UMK
SEBAGAI
PENYERAP
TENAGA
KERJA
TERBANYAK**

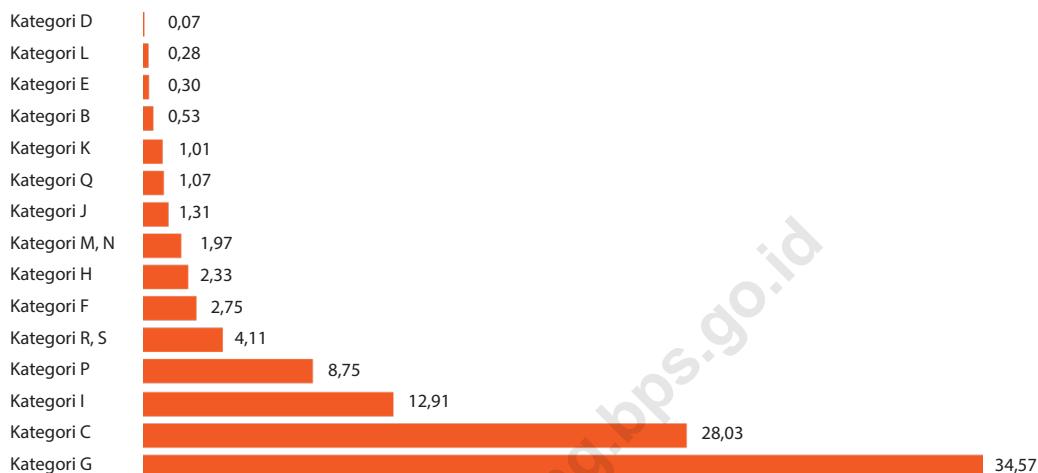
Gambar 3
Tingkat Pengangguran Jawa Tengah Menurut Pendidikan, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan



Gambar 4. Persentase Penyerapan Tenaga Kerja UMK Menurut Kategori, 2017



Tabel 2. Jumlah Usaha, Tenaga Kerja, dan Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja UMK Nonpertanian Menurut Kategori, 2016

Kategori	Jumlah Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja
B. Pertambangan dan Penggalian	31.307	47.806	2
C. Industri Pengolahan	1.009.717	2.506.497	2
D. Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin	3.526	5.878	2
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	14.176	26.630	2
F. Konstruksi	18.790	246.022	13
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	1.777.711	3.091.301	2
H. Pengangkutan dan Pergudangan	156.629	208.753	1
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	611.710	1.154.728	2
J. Informasi dan Komunikasi	79.834	116.899	1
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	19.179	90.165	5
L. Real Estat	20.209	24.961	1
M, N. Jasa Perusahaan	59.263	175.789	3
P. Pendidikan	84.019	782.787	9
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	30.284	95.957	3
R,S. Aktivitas Jasa Lainnya	189.563	367.878	2
Total	4.105.917	8.942.051	2

**PENGELOLAAN
UMK
DILAKUKAN
SECARA
SEDERHANA**

Bagian

3

<https://jateng.bps.go.id>

PENGELOLAAN UMK DILAKUKAN SECARA SEDERHANA

UMK di Jawa Tengah memiliki karakteristik informal, yaitu usaha yang dicirikan dengan tidak adanya status badan hukum, tidak adanya sistem pencatatan keuangan, dijalankan dengan modal yang terbatas dan keahlian yang terbatas, serta penggunaan teknologi yang masih sederhana. Pengelolaan yang sederhana ini tentunya akan berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh UMK. Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja UMK adalah menjalin kemitraan dengan perusahaan yang lebih besar untuk mendapatkan pembinaan, bantuan modal, bantuan pemasaran, pengadaan bahan baku, dan lainnya. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan UMK sekaligus akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

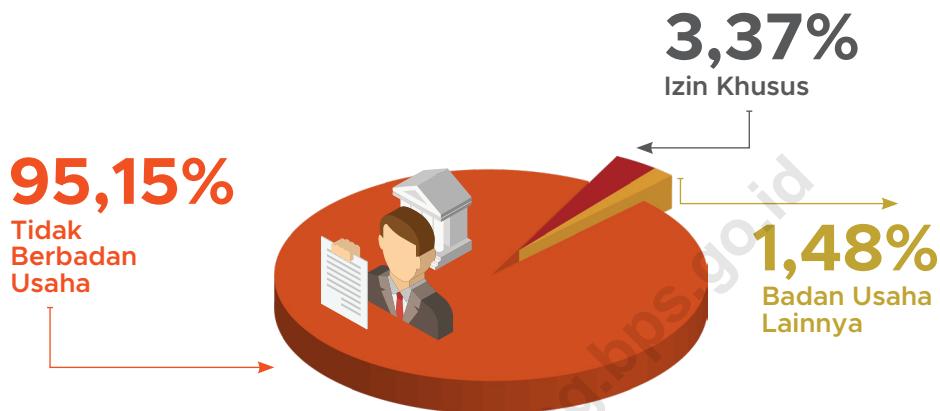
Dari data SE2016 Lanjutan menunjukkan bahwa pengelolaan UMK dilakukan secara sederhana tercermin dari status badan hukum dan penggunaan teknologi. Di Jawa Tengah, jumlah UMK yang tidak berbadan usaha masih sangat mendominasi yaitu mencapai lebih dari 90 persen. Mayoritas UMK juga belum menggunakan komputer dan memanfaatkan internet. Komputer dan internet tidak hanya bermanfaat untuk melakukan laporan keuangan, juga bermanfaat untuk mendesain

produk, pemasaran dan lain-lain. Sayangnya, kurang dari 10 persen UMK yang menggunakan komputer dan memanfaatkan internet.

Untuk meningkatkan pendapatan UMK sekaligus meningkatkan daya saing produknya, kemitraan menjadi salah satu cara yang tepat. Namun demikian, usaha ini masih belum menjadi pilihan bagi UMK. Keterbatasan informasi menjadi salah satu kendala untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan besar. Hanya sekitar 7 persen UMK yang menjalin kemitraan dengan perusahaan lain.

Di antara sektor nonpertanian di Jawa Tengah, UMK Aktivitas Pendidikan dan Aktivitas Keuangan dan Asuransi yang pengelolaannya paling baik. Hal ini tercermin dari variabel-variabel status badan usaha, penggunaan internet, dan penggunaan komputer. Sementara dari aspek menjalin kemitraan, hampir semua kategori belum menjalin kemitraan secara optimal.

Gambar 5
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Status Badan Usaha, 2017



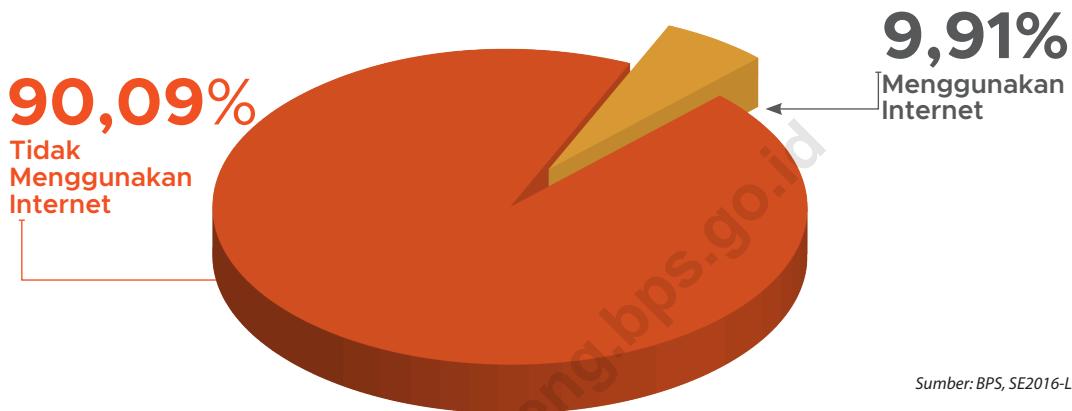
Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 6
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Penggunaan Komputer dalam Usaha, 2016



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 7
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Penggunaan Internet dalam Usaha, 2016



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 8
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Keikutsertaan dalam Kemitraan, 2017

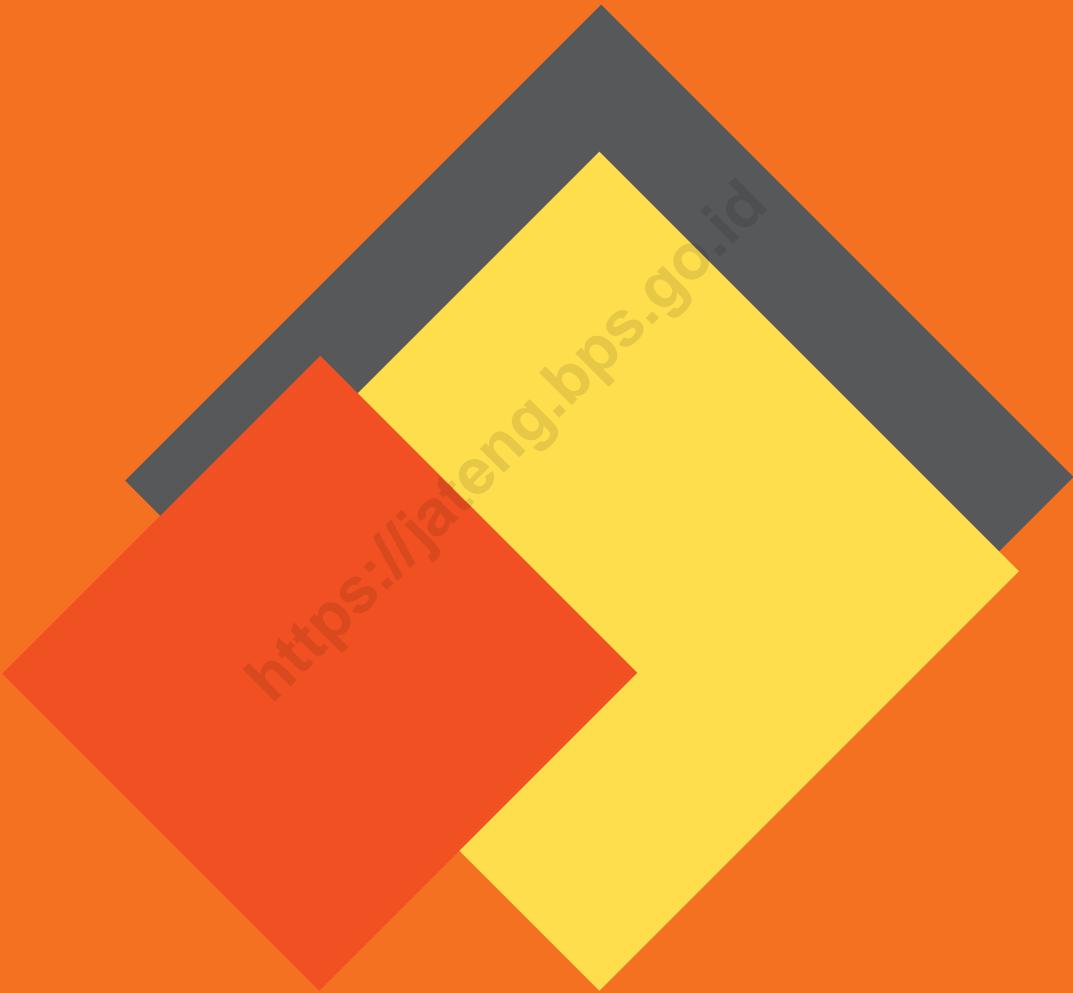


Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Tabel 3.
Persentase UMK yang Berbadan Usaha, Menggunakan Komputer, Menggunakan Internet dan Menjalinkan Kemitraan, 2016

Kategori	Berbadan Usaha	Menggunakan Komputer	Menggunakan Internet	Menjalinkan Kemitraan
B. Pertambangan dan Penggalian	0,44	0,25	0,82	2,33
C. Industri Pengolahan	2,61	2,73	6,83	9,95
D. Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin	11,17	68,89	70,99	23,23
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	3,08	3,16	3,56	8,13
F. Konstruksi	22,14	28,97	35,17	22,87
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	2,66	3,28	7,78	6,70
H. Pengangkutan dan Pergudangan	3,43	2,01	6,21	4,06
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	1,25	1,14	4,31	2,74
J. Informasi dan Komunikasi	2,33	24,98	41,34	10,44
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	68,97	48,53	34,83	15,91
L. Real Estat	2,00	2,50	5,48	1,42
M, N. Jasa Perusahaan	9,53	29,89	30,87	13,77
P. Pendidikan	75,56	68,07	63,11	15,35
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	55,23	24,74	30,28	16,86
R,S. Aktivitas Jasa Lainnya	3,22	8,17	27,24	4,57
Total	4,85	5,65	9,91	7,21

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan



PELAKU UMK
PERLU MENINGKATKAN
KAPABILITAS

Bagian

4

<https://jatekn.bps.go.id>

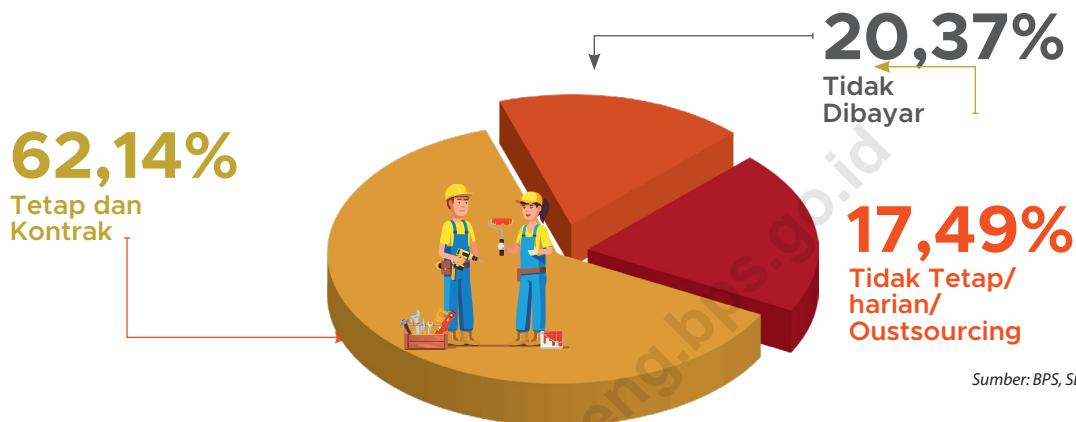
Salah satu faktor keberhasilan suatu usaha adalah sumber daya manusia yang berkualitas dengan sistem manajemen pembagian tugas yang baik. Namun, sebagian besar usaha dilakukan secara perorangan. Karena skala usaha yang kecil dan pengelolaannya dilakukan secara sederhana, seluruh proses usaha atau produksi sampai pemasaran dilakukan sendiri oleh pengelola atau pengusaha. Selain itu, masih banyak UMK yang dibantu oleh pekerja keluarga/tidak dibayar. Hasil data SE2016 Lanjutan menunjukkan sekitar 20 persen UMK dibantu oleh pekerja keluarga/tidak dibayar. Kategori yang paling banyak dibantu buruh tidak dibayar adalah aktivitas Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G) dan Industri Pengolahan (Kategori C).

Peranan UMK dalam menggerakkan perekonomian tidak terlepas dari peran perempuan baik sebagai pengusaha maupun tenaga kerja. Secara umum, persentase pengusaha UMK yang berjenis kelamin perempuan sekitar 49 persen. Meskipun masih rendah dari laki-laki, persentase ini dianggap cukup tinggi mengingat masih berlakunya stereotipe bahwa laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama. Berpijak dengan hal tersebut dapat diduga jika UMK juga dijalankan sebagai penunjang perekonomian keluarga.

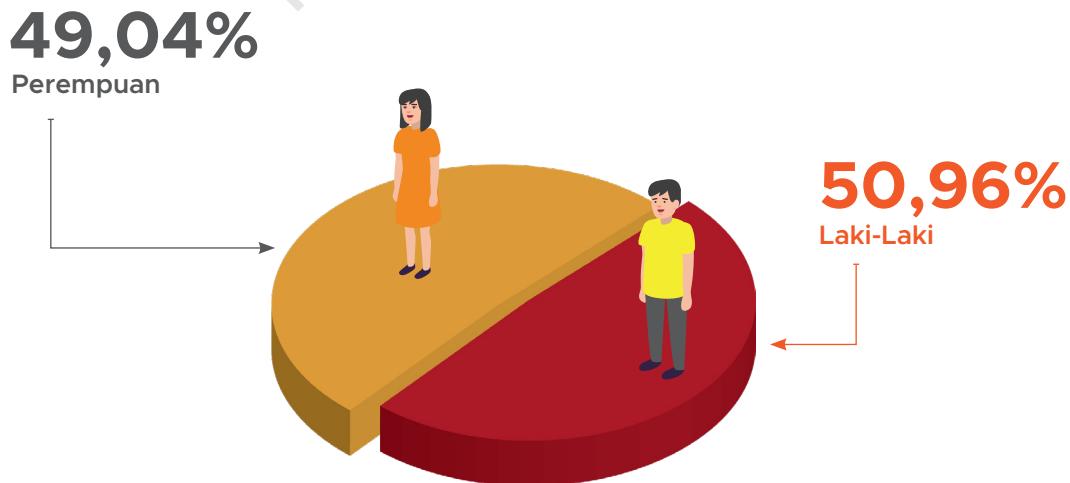
Secara umum kualitas pendidikan pengelola UMK masih rendah. Lebih dari 40 persen pengelola berpendidikan SD atau tidak tamat SD. Pengelola dengan pendidikan SMA dan SMK juga cukup besar mencapai 20 persen. Masih rendahnya pendidikan pengelola UMK menjadi tantangan bagi Pemerintah untuk memberikan bantuan bagi pelaku usaha ini seperti, misalnya dengan memberikan pelatihan. Sayangnya, Hasil SE2016 Lanjutan menunjukkan bahwa pelaku UMK yang pernah mengikuti pelatihan hanya 4,61 persen.

**PELAKU
UMK
MAYORITAS
PERORANGAN**

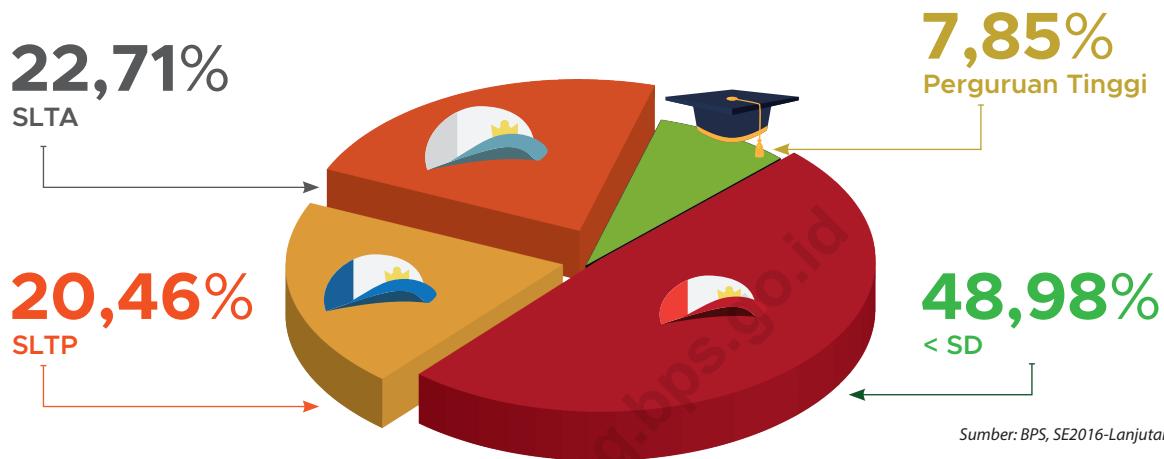
Gambar 9
Persentase Tenaga Kerja UMK Nonpertanian
Menurut Status Pekerja, 2016



Gambar 10
Persentase Pengusaha UMK Nonpertanian Menurut Jenis Kelamin, 2017



Gambar 11
Persentase Pengusaha UMK Nonpertanian Menurut Pendidikan, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Tabel 4.
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Kategori dan Jumlah Tenaga Kerja

Kategori	Tetap dan Kontrak	Tidak Tetap/Harian/Outsourcing	Tidak Dibayar
B. Pertambangan dan Penggalian	68,55	17,30	14,14
C. Industri Pengolahan	50,02	25,04	24,94
D. Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin	73,68	4,20	22,12
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	63,87	14,12	22,01
F. Konstruksi	19,44	79,52	1,04
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	65,92	11,04	23,05
H. Pengangkutan dan Pergudangan	81,06	14,47	4,46
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	63,03	8,73	28,23
J. Informasi dan Komunikasi	76,66	3,69	19,65
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	76,39	4,72	18,89
L. Real Estat	84,86	3,06	12,09
M, N. Jasa Perusahaan	54,00	37,47	8,54
P. Pendidikan	85,02	10,87	4,11
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	87,34	8,79	3,87
R,S. Aktivitas Jasa Lainnya	65,92	23,80	10,27
Total	62,14	17,49	20,37

**KINERJA USAHA
DARI SISI
KEUANGAN**

Bagian

5

<https://jateng.bps.go.id>

KINERJA USAHA DARI SISI KEUANGAN

Kinerja usaha merupakan hasil dari kegiatan pemanfaatan sumber daya suatu usaha yang dapat diukur dengan beragam cara, salah satunya adalah laba usaha. Berdasarkan data hasil SE2016 Lanjutan, perolehan laba Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menunjukkan capaian yang positif meskipun beberapa usaha dipandang mengalami penurunan. Lebih dari dua puluh lima persen UMK di Jawa Tengah menyatakan bahwa keuntungan usaha mereka di tahun 2016 menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Selain laba usaha, rasio cost to income juga digunakan untuk melihat tingkat efisiensi suatu usaha. Semakin rendah rasio suatu usaha maka semakin baik atau semakin menguntungkan usaha tersebut. Pada infografis dapat terlihat bahwa UMK di Kota Pekalongan adalah yang paling profitable di Jawa Tengah dengan rasio 0,58. Sektor UMK di kabupaten ini mampu mengais keuntungan hingga nyaris seratus persen dari biaya yang dikeluarkan. Sebaliknya, rasio pengeluaran tertinggi ada di Kabupaten Wonosobo dengan rasio 0,82.

Jika dicermati lebih jauh menggunakan kategori lapangan usaha, kategori L (Real Estat) dan G (Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor) merupakan kategori lapangan usaha

yang paling menguntungkan dengan rasio sebesar 0,28 dan 0,35. UMK pada kategori-kategori tersebut mampu mendulang pendapatan hingga sekitar tiga kali lipat biaya yang dikeluarkan. Sedangkan rasio pengeluaran terhadap pendapatan tertinggi disematkan pada Kategori D (Pengadaan Listrik, Gas/Uap Air Panas, dan Udara Dingin) dengan rasio mencapai 0,82.

Namun demikian, Kategori L dan G bukan usaha yang memberikan rata-rata balas jasa pekerja dalam setahun yang tertinggi. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial memiliki nilai balas jasa pekerja tertinggi, yaitu sekitar 30 juta per pekerja. Selanjutnya, Kategori F (Konstruksi) dan Kategori P (Pendidikan) memberikan masing-masing balas jasa lebih dari 23 juta per pekerja dan 20 juta per pekerja.

Gambar 5.1.
Peta Sebaran UMK menurut Kinerja Keuangan Tertinggi dan Terendah Di Masing-Masing Kabupaten, 2017

Kabupaten	Banyaknya Usaha	Rasio Pengeluaran Terhadap Pendapatan
[01] CILACAP	190.153	0,62
[02] BANYUMAS	213.365	0,69
[03] PURBALINGGA	133.606	0,67
[04] BANJARNEGARA	118.902	0,71
[05] KEBUMEN	180.146	0,67
[06] PURWOREJO	90.554	0,68
[07] WONOSOBO	118.420	0,82
[08] MAGELANG	168.339	0,70
[09] BOYOLALI	114.208	0,70
[10] KLATEN	152.227	0,66
[11] SUKOHARJO	92.728	0,67
[12] WONOGIRI	129.996	0,66
[13] KARANGANYAR	112.999	0,70
[14] SRAGEN	109.313	0,71
[15] GROBOGAN	133.634	0,69
[16] BLORA	91.890	0,70
[17] REMBANG	71.026	0,71
[18] PATI	135.593	0,67
[19] KUDUS	90.331	0,73
[20] JEPARA	138.675	0,70
[21] DEMAK	105.289	0,69
[22] SEMARANG	117.820	0,68
[23] TEMANGGUNG	104.761	0,75
[24] KENDAL	92.401	0,69
[25] BATANG	107.455	0,70
[26] PEKALONGAN	123.554	0,70
[27] PEMALANG	141.441	0,65
[28] TEGAL	169.645	0,68
[29] BREBES	178.080	0,66
[71] MAGELANG	20.628	0,62
[72] SURAKARTA	79.566	0,61
[73] SALATIGA	25.384	0,69
[74] SEMARANG	173.184	0,62
[75] PEKALONGAN	45.427	0,58
[76] TEGAL	35.177	0,64
JAWA TENGAH	4.105.917	0,68

Catatan:

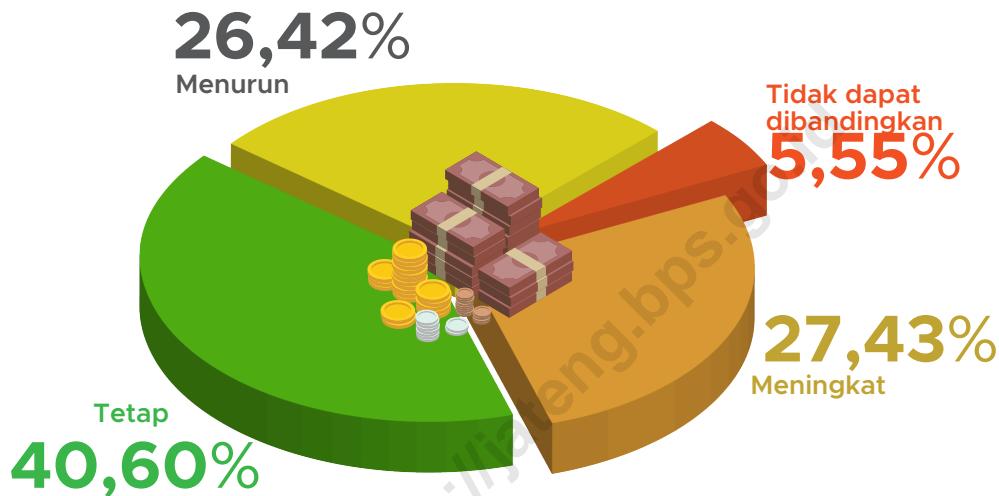
Rasio pengeluaran terhadap pendapatan menunjukkan tingkat efisiensi suatu usaha. Semakin rendah rasio suatu usaha maka semakin menguntungkan atau semakin baik kinerja keuangannya

Kabupaten Wonosobo merupakan kabupaten dengan rasio pengeluaran terhadap pendapatan tertinggi se-Jawa Tengah

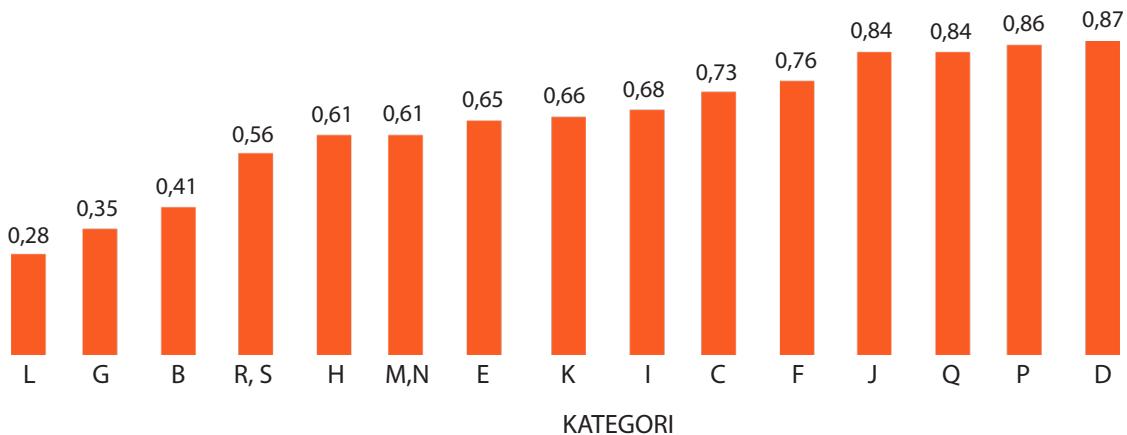
Kota Pekalongan merupakan provinsi dengan rasio pengeluaran terhadap pendapatan terendah se-Jawa Tengah

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 12
 Persentase UMK menurut Kondisi Laba 2016 dibanding 2015



Gambar 13
 Persentase UMK menurut Kondisi Laba 2016 dibanding 2015



PROSPEK DAN KENDALA USAHA

<https://jateng.bps.go.id>

Bagian

6

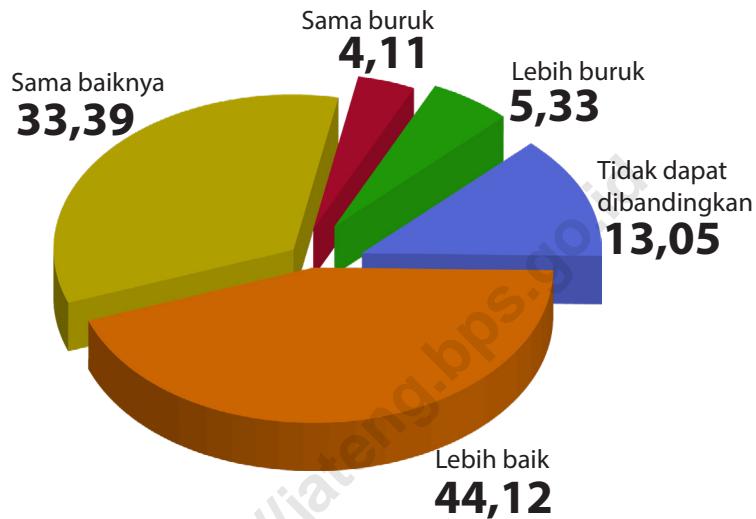
RPJMN 2015-2019 menargetkan adanya peningkatan usaha-usaha yang berpotensi tumbuh dan inovatif, yaitu usaha yang memiliki prospek bagus di masa mendatang. Dalam SE2016 Lanjutan, prospek adalah harapan atau kemungkinan, dalam hal ini prospek berkaitan dengan kondisi usaha atau tendensi bisnis ke depan baik dari sisi perolehan keuntungan, atau omset. Pengusaha UMK yang menyatakan bahwa usaha mereka akan lebih baik di masa mendatang ada sekitar 44,12 persen.

Agar kondisi bisnis ke depan menjadi lebih baik, tentunya diperlukan upaya untuk mengurangi kendala yang dihadapi. UMK di Jawa Tengah 72 persen memiliki kendala dalam menjalankan usaha. Adanya persaingan dan permodalan merupakan permasalahan utama yang dihadapi. Sekitar lebih dari lima puluh persen UMK menyatakan memiliki kendala tersebut.

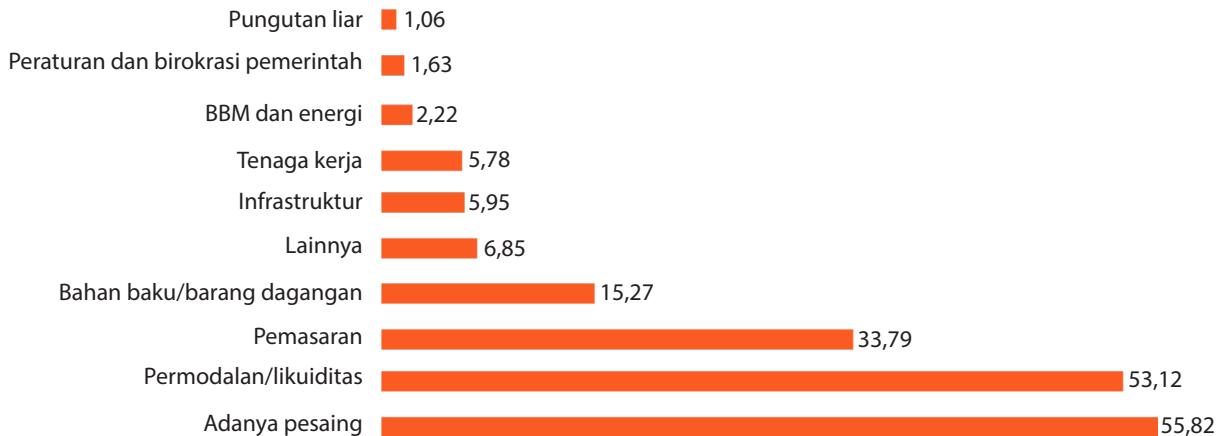
Permodalan merupakan faktor produksi utama yang harus ada pada setiap proses produksi atau usaha. Oleh sebab itu, akses kredit dari lembaga keuangan merupakan hal yang penting agar UMK dapat meningkatkan kapasitas usahanya. Kebijakan pemerintah

dalam pemberian akses kredit untuk UMKM sebetulnya sudah sangat terbuka. Lembaga keuangan saat ini telah banyak memberikan berbagai jenis kredit yang meringankan. Bank Indonesia telah mewajibkan Bank Umum untuk memberikan Kredit atau Pembiayaan kepada UMKM (Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015). Namun hanya sekitar 13 persen usaha yang memperoleh/mengajukan kredit ke lembaga keuangan. Alasan UMK tidak mengajukan kredit melalui lembaga keuangan utamanya adalah karena 56 persen merasa belum berminat untuk mengajukan kredit. Sedangkan bagi pengusaha yang membutuhkan kredit namun belum mengajukan/mendapatkan kredit adalah karena alasan bunga tinggi, tidak memiliki agunan, tidak tahu prosedur, prosedur sulit, dan usulan ditolak.

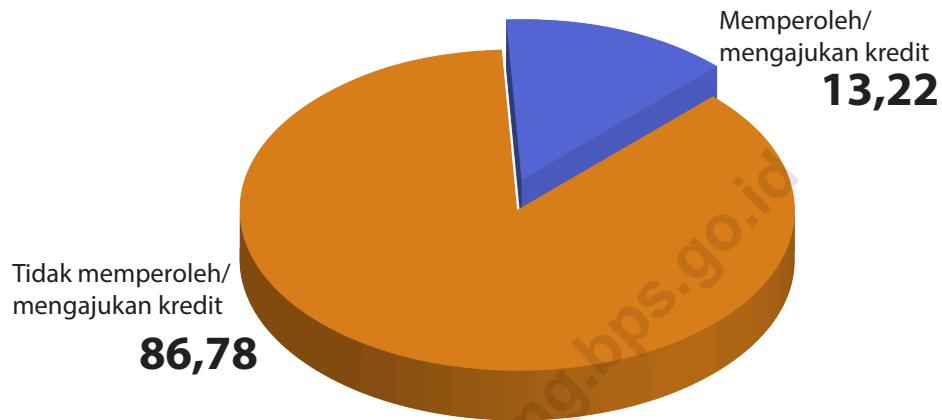
Gambar 14
 Persentase UMK Menurut Prospek UMK Tahun 2018



Gambar 15
 Persentase UMK Yang Menyatakan Adanya Kendala Usaha Menurut Jenis Kendala (Persen), 2017

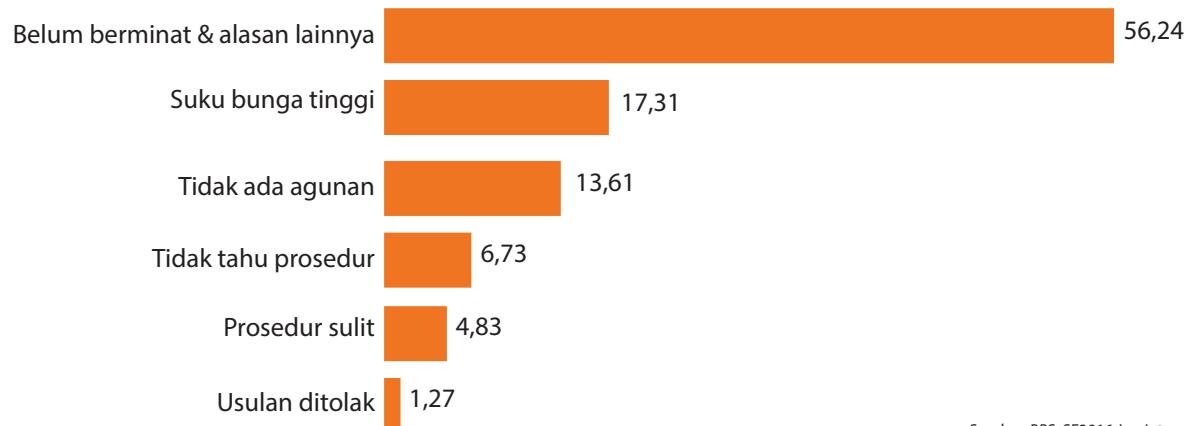


Gambar 16
Persentase UMK menurut Kondisi Laba 2016 dibanding 2015



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 17
Persentase UMK yang Tidak Memperoleh/Mengajukan Kredit dari Lembaga Keuangan Menurut Alasannya, 2016



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Pahlawan No.6 Semarang

Telp. 024 - 8412802, 8412804, 8412805 Fax. 024 - 8311195

Homepage : <http://jateng.bps.go.id> E-mail : jateng@bps.go.id